

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEMISKINAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BALI TAHUN 2007-2013

**Arini¹
Made Dwi Setyadhi Mustika²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: arini_arin22@yahoo.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi setiap daerah, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan diantaranya meningkatkan belanja tidak langsung agar masyarakat semakin sejahtera, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. *Path analysis* merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan uji sobel untuk mengetahui pengaruh tidak langsung. Hasil analisis menunjukkan PAD memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan namun belanja tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel mediasi dalam pengaruh belanja tidak langsung terhadap kemiskinan namun pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel mediasi dalam pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, belanja tidak langsung, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is a problem facing every region, many efforts made by the government in tackling poverty include indirect expenditure in order to improve society more prosperous, and promote economic growth to raise incomes. The purpose of this study is to analyze the effect of direct and indirect influence of local revenues and expenditures indirectly against poverty through economic growth in the province of Bali. Data collection is done through non-participant observation. This study uses secondary data. Path analysis is an analytical method used to determine the effect of direct and Sobel test to determine the effect is not immediate. The analysis showed PAD have a positive influence on economic growth but indirect expenditure does not affect the economic growth. PAD and economic growth has a negative and significant impact on poverty but indirect spending has no effect on poverty. Economic growth is a variable mediating the effect of indirect expenditures on poverty but not of economic growth as a mediating variable in the effect of indirect expenditure to economic growth.

Keywords: local revenues, indirect expenditure, economic growth, poverty

PENDAHULUAN

Otonomi daerah atau sering disebut desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama membangun daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya dalam pemanfaatan potensi-potensi di daerahnya. Pembentukan desentralisasi fiskal ini bertujuan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian daerah mengelola daerahnya dan mengurangi subsidi pemerintah, serta melakukan pembangunan yang merata untuk setiap daerah. Terdapat beberapa faktor dalam keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, keuangan daerah yang dikelola dengan baik, teknologi yang memadai, dan manajemen yang baik dalam mengelola daerah serta menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kaho, 2001:60).

Masalah yang masih banyak dihadapi oleh seluruh daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi masalah baik pada daerah perkotaan maupun pedesaan. Kemiskinan terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih memiliki kemampuan rendah dalam membuka lapangan pekerjaan dan tidak banyak peluang masyarakat untuk mendapat pekerjaan serta banyaknya pekerja yang di-PHK karena para pengusaha kekurangan modal dan gulung tikar (Setiyawati dan Hamzah, 2007). Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi namun upaya tersebut masih belum cukup dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Bali

yang terkenal sebagai destinasi pariwisata juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan penduduk (BPS Provinsi Bali, 2013:491). Berdasarkan data BPS (2014), secara rerata, dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin di kota cenderung lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk miskin di desa, hal ini disebabkan banyaknya penduduk desa yang berurbanisasi ke kota namun, tidak memiliki keterampilan, sehingga tidak mendapat pekerjaan dan menjadi penduduk miskin di kota.

Kemiskinan yang semakin tinggi disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang tinggi. Menurut Santosa (2013) peningkatan kemiskinan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang tidak diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi yaitu pemerintah berperan dalam membuat kebijakan fiskal sedangkan sektor swasta dalam pengembangan atau membuka kesempatan kerja dan masyarakat sebagai sumber daya manusia yang merupakan input produksi.

Bali adalah provinsi yang bergantung pada sektor pariwisata yang kemudian menghidupkan sektor lainnya. Sektor pariwisata dan sektor lainnya yang ada di Bali memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Provinsi Bali memiliki laju pertumbuhan yang berfluktuasi (BPS, 2014). Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang terdapat di Provinsi Bali, sehingga perubahan laju pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang terdapat di Provinsi Bali sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

Daerah dalam meningkatkan pertumbuhannya dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan keuangan, baik dari segi pendapatan dan pengeluarannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi merupakan tujuan dari masing-masing pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan PAD yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. PAD adalah pemasukan daerah yang diperoleh dari hasil mengelola potensi-potensi daerah oleh pemerintah daerah.

Upaya peningkatan PAD bertujuan menunjang anggaran belanja daerah. Belanja daerah cenderung memiliki kekurangan dalam pembiayaannya karena anggaran APBN dan APBD yang akan diterima daerah. Belanja daerah terdiri dari berbagai macam karena keperluan daerah dan pengeluaran daerah sangat banyak guna meningkatkan potensi daerah, terutama sumber daya manusia yang dimiliki. Seluruh pembelanjaan yang dilakukan pemerintah akan dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Menurut PP 58/2005 dan PERMENDAGRI 59/2007 alokasi pembelanjaan yang terdapat dalam APBD terdapat dua pengeluaran yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan secara optimal dan memperbesar tabungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan nasional. Belanja tidak langsung diarahkan kepada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat belanja daerah merupakan porsi pengeluaran tertinggi digunakan untuk belanja tidak langsung yang mencapai 67,40 persen dari total belanja daerah dan sisanya

sebanyak Rp 1,26 trilyun (32,60%) digunakan untuk belanja langsung (BPS Provinsi Bali, 2014).

Belanja daerah dan PAD memiliki hubungan yang erat. Besar kecilnya PAD akan membantu dalam menunjang belanja daerah. Belanja daerah kemudian dialokasikan untuk belanja tidak langsung dengan porsi yang semakin besar guna menambah sarana prasarana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan yang ada (BPS Provinsi Bali, 2014). Hal ini didukung penelitian Lin dan Liu (2000), menurut pendapat mereka yaitu otonomi daerah atau desentralisasi fiskal berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalah yang terjadi saat ini pada pemerintah daerah adalah meningkatnya pendapatan tidak diimbangi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta nantinya tidak diimbangi dengan merendahnya jumlah pengangguran dan kemiskinan (Santosa, 2013). Menurut Suliswanto (2010) pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan faktor berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewanto, dkk. (2014) pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan Teori Simon Kuznet sebagai teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih bermanfaat apabila diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan. Hipotesis Simon Kuznet menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kuznet berpendapat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan adalah semakin tinggi koefisien gini akan semakin rendah distribusi pendapatan (Boediono, 2008:61). Menurut Kuznet pada tahap

awal pendapatan per kapita terhadap kesenjangan distribusi pendapatan cenderung meningkat. Tahap berikutnya distribusi pendapatan bertambah tinggi hingga pada tahap akhir kesenjangan distribusi pendapatan akan menurun. Dasar dari hipotesis Kusnetz adalah ketimpangan yang rendah yang terjadi dipedesaan dengan sektor yang mendominasi adalah pertanian dibandingkan dengan perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa dan industri yang tingkat ketimpangan pendapatannya tinggi, terjadi transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor jasa (Arsyad, 2010:292).

Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2004, PAD didefinisikan sebagai penerimaan daerah yang diperoleh dari pungutan di daerah sesuai dengan aturan daerah serta peraturan undang-undang. PAD bersumber dari retribusi daerah, perusahaan daerah, pajak daerah, dan lain-lain yang diperoleh dari hasil usaha daerah yang sah. PAD yang diterima pemerintah daerah menggambarkan tingkat kesiapan daerah mengelola daerahnya. Semakin tinggi PAD maka semakin besar anggaran belanja terutama dalam pengalokasian belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah maka semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat. Menurut Santosa (2013) menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan daerah. Semakin baik daerah dalam mengelola potensi daerahnya maka semakin tinggi pendapatan yang diterima sehingga daerah tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada.

Belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak dikaitkan secara langsung dalam program atau kegiatan (Haryanto, 2013). Belanja tidak langsung diarahkan kepada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik.

Tujuan utama dalam alokasi belanja tidak langsung adalah kemiskinan yang ada di daerah. Kajian yang meneliti hubungan belanja pemerintah dengan kemiskinan dilakukan oleh Merdekawati dan Budiantara (2013) yang menyatakan bahwa, pengalokasian belanja daerah untuk bantuan sosial berpengaruh positif terhadap penurunan persentase kemiskinan. Hal ini menandakan alokasi belanja daerah untuk bantuan sosial yang dilakukan pemerintah sudah tepat sasaran dan berjalan dengan baik dalam mengurangi kemiskinan di daerah. Menurut Suryadarma dan Suryahadi (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran barang publik dan swasta akan menurunkan kemiskinan lebih cepat apabila mengandalkan belanja publik.

PAD berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Meningkatnya PAD maka tingkat kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya dikatakan semakin baik dan ketergantungan terhadap subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat berkurang. Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengakibatkan pungutan pajak meningkat dan meningkatnya penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap PAD. Hal ini menandakan PAD berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pernyataan ini didukung oleh penelitian Mawarni, dkk. (2013)

mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berdampak signifikan terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Belanja tidak langsung diduga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Banyak peneliti yang meneliti pengaruh antara belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave tentang model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi ke dalam beberapa tahap. Penyediaan prasarana yang dikemukakan oleh Rostow merupakan komponen dari belanja tidak langsung yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus meningkatkan pengeluaran pada infrastruktur, sosial dan kegiatan ekonomi, selain itu, pemerintah harus mendorong dan mendukung inisiatif sektor swasta dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Egbetunde dan Fasanya, 2013).

Pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan apabila dibarengi dengan pengurangan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan. Penurunan kemiskinan dapat lebih cepat jika penduduk miskin mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan. Menurut *growth* model dari Rostow menyatakan bahwa memperbesar kue pembangunan terlebih dahulu kemudian di distribusikan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah terlebih dahulu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian didistribusi atau memberikan dampak terhadap daerah-daerah dalam tingkat kesejahteraan dan menurunkan tingkat

kemiskinan yang terdapat di daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Jonaidi (2012), Sinegar dan Wahyuniarti (2006) dan Balisacan *et al* (2003) menyatakan bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti menurunnya kemiskinan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (a) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2007-2013? (b) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2007-2013? (c) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2007-2013?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai antara lain: (a) untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2007-2013, (b) untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2007-2013, dan (c) untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2007-2013.

Harapan dari penelitian ini yaitu secara teoritis dapat dimanfaatkan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh dalam masa perkuliahan tentang pendapatan

asli daerah, belanja tidak langsung, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan serta meningkatkan pengetahuan melalui berbagai temuan pada penelitian. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berkontribusi dalam bentuk pemikiran kepada masyarakat maupun pemerintah mengenai pendapatan asli daerah, belanja tidak langsung, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian yang dikemukakan terahulu, maka hipotesis yang diperoleh yaitu:

1. Pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2007-2013.
2. Pendapatan asli daerah, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali tahun 2007-2013.
3. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2007-2013.
4. Belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2007-2013.

METODE PENELITIAN

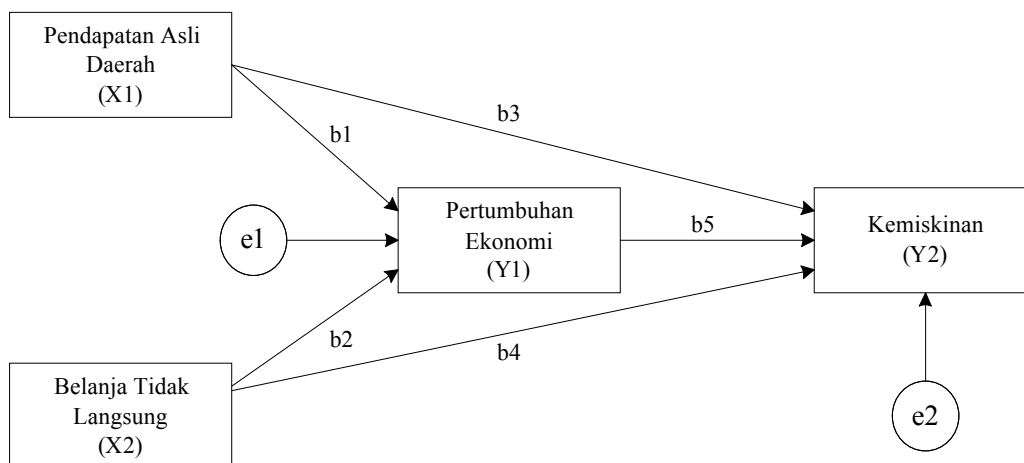
Lokasi dari penelitian ini dipilih di kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Lokasi tersebut dipilih karena Bali memiliki potensi besar dari segi pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pariwisata dan sumber daya

manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data dalam penelitian yang digunakan berdasarkan sumbernya yaitu data sekunder.

Metode observasi non partisipan merupakan metode yang dipilih dalam pengumpulan data yang dilakukan, yang terdiri dari: mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian dari buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, serta dokumen – dokumen yang terdapat dari instansi seperti BPS, internet, dan buku-buku literatur tentang PAD, belanja tidak langsung, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Analisis jalur atau yang biasa dikenal dengan *path analysis* merupakan teknik untuk menganalisis data dalam uji pengaruh langsung dan uji sobel untuk menguji pengaruh tidak langsung. Analisis jalur adalah pengembangan dari analisis regresi linier berganda, untuk menaksir hubungan antar variabel dalam analisis jalur yang ditunjukkan dengan anak panah (Suyana Utama, 2012:156). Pengujian hubungan variabel yang digunakan didasarkan teori yang menyatakan memiliki hubungan secara kausal.

Gambar 1.
Model Analisis Jalur



Berdasarkan Gambar 1. dapat dibuat persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dirumuskan seperti di bawah ini:

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y_1 = *Pertumbuhan Ekonomi*
- X_1 = *Pendapatan Asli Daerah*
- X_2 = *Belanja Tidak Langsung*
- Y_2 = *Kemiskinan*
- e_1, e_2 = *variabel pengganggu*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (a) pengujian pengaruh langsung, yakni menguji pengaruh langsung pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh langsung pendapatan asli daerah, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan serta (b) Pengaruh tidak langsung variabel pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui variabel pertumbuhan ekonomi, yang diuji dengan menggunakan uji Sobel. Hasil

pengujian persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2 dapat dilihat di bawah ini yaitu di Tabel 1.

Tabel 1.
Hasil Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	T. Hitung	P. Value	Keterangan
X1 → Y1	0,577	0,577	3,926	0,000	Signifikan
X2 → Y1	-0,084	-0,084	-0,575	0,568	Tidak Signifikan
X1 → Y2	-0,248	0,286	-1,962	0,055	Signifikan
X2 → Y2	-0,019	0,426	-0,168	0,867	Tidak Signifikan
Y1 → Y2	-0,595	0,285	-6,009	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil dari pengujian pada Tabel 1 yang menunjukkan pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,577 dan nilai dari t hitung sebesar 3,926 > dari nilai t tabel sebesar 1,645 ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya bahwa pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Pengaruh positif antara variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang didapat pada penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman, mereka menyatakan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan pungutan pajak semakin besar dan meningkatnya penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (Mangkoesoebroto, 1993:173). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Mawarni, dkk (2013) dan Setiyawati dan Hamzah (2007) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana apabila

pendapatan asli daerah meningkat maka berarti pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali meningkat. Hal tersebut berarti pembangunan yang dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah berhasil.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 1 pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai dari *standardized coefficient beta* sebesar -0,084 serta nilai *t* hitung sebesar $0,575 < t$ tabel sebesar 1,645 ini berarti H_0 diterima H_1 ditolak, artinya belanja tidak langsung (X_2) tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Hasil yang didapat tidak sejalan dengan teori yang dikembangkan Rostow dan Musgrave tentang model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, dimana penyediaan prasarana yang dikemukakan oleh Rostow merupakan komponen dari belanja tidak langsung yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Hasil pada penelitian ini juga tidak sejalan dengan kajian yang dilaksanakan Adi (2006) dan Prakarsa (2014) yang menyebutkan belanja pembangunan berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun hasil pada penelitian ini sejalan dengan kajian yang dilaksanakan Setiyawati dan Hamzah (2007) yang menyebutkan belanja pembangunan tidak berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bisa dikarenakan penyalahgunaan dana untuk pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus meningkatkan pengeluaran pada infrastruktur, sosial dan kegiatan ekonomi, selain itu, pemerintah harus mendorong dan mendukung inisiatif sektor swasta dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 1 pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan, diperoleh nilai dari *standardized coefficient beta* sebesar -0,248 serta nilai t hitung sebesar 1,962 > t tabel sebesar 1,645 ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan (Y_2). Hubungan signifikan negatif antara variabel pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan yang didapat dalam penelitian sesuai dengan kajian yang dibuat oleh Santosa (2013) yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan daerah, serta sesuai dengan Teori Hipotesis Kuznet. Peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di Provinsi Bali pada penelitian ini membuktikan meningkatnya pendapatan asli daerah akan dapat menurunkan kemiskinan. Daerah sudah mampu mendistribusikan potensi daerah dengan baik sehingga jumlah penduduk miskin semakin menurun.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 1 pengaruh langsung belanja tidak langsung terhadap kemiskinan, diperoleh nilai dari *standardized coefficient beta* sebesar -0,019 serta nilai t hitung sebesar 0,168 < t tabel sebesar 1,645 ini berarti belanja tidak langsung (X_2) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Y_2). Hasil dalam penelitian ini berbeda dengan Teori Keynes. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil dari penelitian Merdekawati dan Budiantara tahun 2013, mereka menyatakan bahwa pengalokasian belanja daerah terhadap bantuan sosial berpengaruh positif terhadap penurunan persentase kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, alokasi belanja tidak langsung pada daerah masih kurang dimaksimalkan karena dalam pengentasan kemiskinan lebih banyak peran

pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta peran swasta. Bantuan-bantuan yang ada lebih didominasi oleh bantuan dari luar pemerintah daerah.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 1 pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, diperoleh nilai dari *standardized coefficient beta* sebesar -0,595 serta nilai t hitung sebesar 6,009 > t tabel sebesar 1,645 ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan (Y_2). Hubungan signifikan negatif antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan *growth* model dari Rostow menyatakan bahwa memperbesar kue pembangunan terlebih dahulu kemudian di distribusikan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah terlebih dahulu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian didistribusi atau memberikan dampak terhadap daerah-daerah dalam tingkat kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan yang terdapat di daerah. Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Balisacan *et al* (2003) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan dan pertumbuhan merupakan satu-satunya faktor yang memengaruhi laju perubahan kemiskinan. Menurut Jonaidi (2012) menyatakan bahwa kemiskinan berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mensejahterakan masyarakat, dimana masyarakat antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah sama-sama dapat menikmati hasil dari tingginya pertumbuhan ekonomi.

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total yang hasilnya seperti di bawah ini :

$$\begin{aligned}
 R_m^2 &= 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2 \\
 &= 1 - (0,851)^2 - (0,647)^2 \\
 &= 0,697
 \end{aligned}$$

Keterangan :

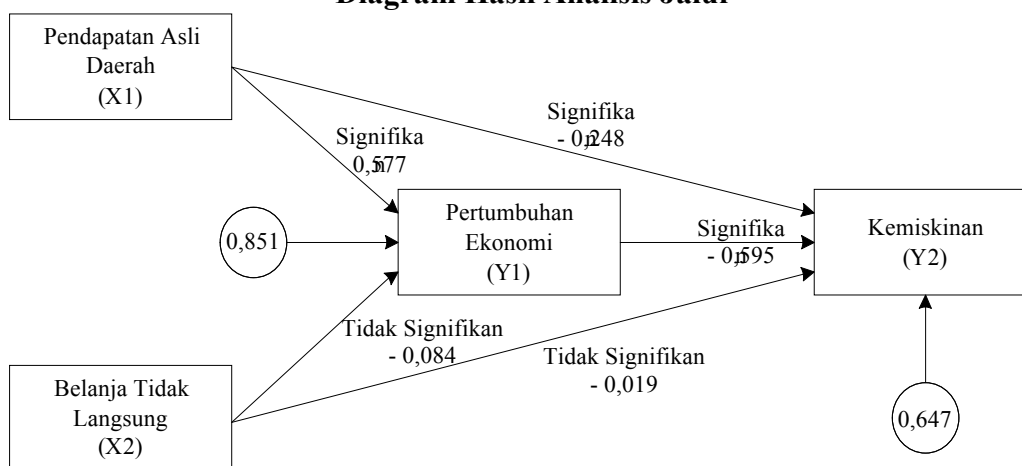
R_m^2 = Koefisien determinasi total

e_1, e_2 = Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total sebesar 69,7 persen, dengan kata lain variansi kemiskinan dipengaruhi model yang dibentuk oleh pendapatan asli daerah, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi dan 30,3 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Berdasarkan uraian dari koefisien jalur di atas maka digambar diagram jalur seperti dibawah ini.

Gambar 1.
Diagram Hasil Analisis Jalur



Sumber: Data diolah, 2015

Pengujian pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui nilai z dari koefisien ab, yang diperoleh dengan menghitung nilai S terlebih dahulu.

Tabel 2.
Hasil Ringkasan Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Antarvariabel	Variabel Mediasi	Sab	Z	Keterangan
X1 → Y2	Y1	0,054	-13,857	Signifikan
X2 → Y2	Y1	0,106	1,770	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan dari Tabel 2. di atas, nilai dari Z hitungnya yaitu sebesar $13,857 > |1,64|$. Artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) merupakan variabel intervening dalam pendapatan asli daerah (X_1) terhadap kemiskinan (Y_2) di Provinsi Bali atau dapat dikatakan pendapatan asli daerah berpengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Tabel 2. nilai Z hitung sebesar $1,770 > |1,64|$. Artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) merupakan variabel intervening dalam belanja tidak langsung (X_2) terhadap kemiskinan (Y_2) di Provinsi Bali atau dapat dikatakan belanja tidak langsung berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.
Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Tidak Langsung, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2013

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y1	
X ₁ → Y ₁	0,577	-	0,577
X ₁ → Y ₂	-0,248	-0,343	-0,591
X ₂ → Y ₁	-0,084	-	-0,084
X ₂ → Y ₂	-0,019	0,049	0,030
Y ₁ → Y ₂	-0,595	-	-0,595

Sumber: Data diolah, 2015

Nilai pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -0,343 berarti pengaruh pendapatan asli

daerah melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah sebesar negatif 34,3 persen. Nilai pengaruh tidak langsung belanja tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0,049 berarti pengaruh belanja tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah sebesar 4,9 persen.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari analisis sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu: (a) pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan setiap peningkatan pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berarti meningkatnya belanja tidak langsung akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, sehingga belanja tidak langsung bukan merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, (b) pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemiskinan yang berarti peningkatan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kemiskinan. Belanja tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, serta (c) belanja tidak langsung memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang merupakan variabel intervening namun pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil dari analisis dan simpulan di atas, dapat disarankan beberapa saran yakni: (a) peningkatan pendapatan asli daerah sangat diperlukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menandakan perekonomian daerah tersebut semakin baik. Selain itu, belanja tidak langsung lebih diarahkan sehingga diharapkan mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya agar tujuan dari belanja tidak langsung yaitu mensejahterakan masyarakat agar tercapai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, (b) alokasi pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi sangat berperan dalam pengurangan kemiskinan, Provinsi Bali agar lebih meningkatkan alokasi pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja tidak langsung pada kabupaten/kota di Provinsi Bali saat ini tidak bisa menurunkan kemiskinan dikarenakan lebih banyak peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan swasta dalam pengentasan kemiskinan, serta (c) hasil analisis dari penelitian ini menyatakan masih terdapat variabel lain yang tidak termasuk ke model yang mempengaruhi kemiskinan sebesar 30,3 persen. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar objek pada penelitian diperluas ataupun ditambah variabel-variabel yang berhubungan dengan kemiskinan.

REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota se-Jawa dan Bali). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.

- , 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2007. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2007. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2008. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2009. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2009. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2004-2008*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2010. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2010. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2011. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2011. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2012. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2012. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2013. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2013. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2014. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- , 2014. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- Balisacan, Arsenio M., Pernia, Ernesto M. & Asra, Abuzar. 2003. Revisiting, Growth and Poverty Reduction in Indonesia: What Do Subnational Data Show?. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, Vol 39. No. 3.

- Boediono. 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- , 2008. *Bangkitnya Perekonomian Asia Timur Satu Dekade Setelah Krisis*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Dewanto, Pendi, Rujiman dan Suriadi, Agus. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kawasan Mebidangro. *Jurnal Ekonom*, Vol 17, No 3.
- Egbetunde, Tajudeen dan Fasanya, Ismail O. 2013. Public Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Evidence from Auto-Regressive Distributed Lag Specification. *Zagreb International Review of Economics & Business*, Vol. 16, No. 1
- Haryanto, Tommy Prio. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Jurnal Ekonomi*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Jonaidi, Arius. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Volume 1, Nomor 1, April 2012.
- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, Jakarta: PT Raja Grafindi Persada.
- Lamartina, Serena dan Zaghini, Andrea. 2008. Increasing Public Expenditures: Wagner's Law In Oecd Countries. *European Central Bank*.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, *Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol. 49. Pg. 1
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahyuddin. 2009. Analisis Vector Auto Regressive (VAR) terhadap Korelasi Antara Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan, Tahun 1985-2005. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 1, Juni 2009.
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja tidak langsung pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Mawarni, Darwanis dan Abdullah, Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Pascasarjana Universitas Syah Kuala.
- Merdekawati, Inggar Putri an Budiantara, Ketut. 2013. Pemodelan Regresi Spline *Truncated* Multivariabel Pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits* Vol. 2, No.1, (2013) 2337-352.
- Nehen, Ketut. 2012. *Perekonomian Indonesia*, Denpasar: Udayana University Press.
- Novianto, Efri. 2012. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi Kalimantan*, Juni 2012, Vol. 4, No. 2.
- Prakarsa, Febrian Dwi. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012).
- Rahyuda, Ketut, I Gusti Murjana Yasa dan Ni Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodelogi Penelitian*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5, No. 2 Juli 2013.
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007. Analisis Pengaruh DAU, DAK, PAD dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2007, Vol. 4, No. 2, Hal. 211-228.
- Sinegar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. 2006. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- . 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Stastitik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Perkasa . Jakarta.
- . 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.

- Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8 No. 2 Desember 2010.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002.
- Suryadarma, Daniel dan Suryadi, Asep. 2007. The Impact of Private Sector Growth on Poverty Reduction: Evidence from Indonesia. *SMERU Working Paper*.
- Suyana Utama, Made. 2008. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- , 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Widodo, Adi, Waridin Dan Maria K., Johanna. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1.
- Wirawan, Nata. 2002. *Statistik 2 (Statistik Inferensial)*. Edisi Kedua. Denpasar: Keraras Emas.
- Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Revenue Capacity. *J.Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 16(3), 413-423.